

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia terkenal dengan alamnya yang melimpah dan sudah memenuhi syarat untuk menjadi negara sejahtera. Lihat saja kekayaan dan potensi alam yang di miliki oleh Indonesia, bagaimana Allah Swt telah melimpahkan kekayaan yang begitu melimpah dan berbagai variasinya. Bung Karno (Presiden Indonesia Pertama) berbicara mengenai kekayaan Indonesia sebagai berikut, “Ibumu Indonesia teramat cantik, cantik langitnya dan buminya, cantik gunungnya dan rimbanya, cantik lautnya dan sungainya, cantik sawahnya dan ladangnya, cantik gunungnya dan padangnya... Ibumu Indonesia teramat kaya. Buminya hanya minta ditegur, maka menghasilkan ia macam-macam kekayaan dan keperluan dunia; hanya minta di asuh dipelihara sedikit, akan menimbulkan berbagai hasil keperluan hidup” (Soeharto Pitut dan Zainul Ihsan, 1981:208).

Sedangkan bangsa Indonesia yang melegendaris yakni Koes Ploes bercerita tentang melimpahnya kekayaan alam Indonesia dalam syair “*Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu, tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu, tongkat ditanam pun menjadi tanaman*”. (Agung Gunanjar Sudarsa, 2013:1).

Manusia yang berakal sehat dan menginginkan kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian tentulah akan merasa bahwa hidupnya

tidak akan sia-sia dan tidak akan menyia-nyiakan sesuatu apapun dalam kehidupannya, baik itu harta benda yang mereka miliki, potensi yang mereka miliki, begitu pula dengan ummat Islam yang senantiasa mengagungkan dan menghargai segala bentuk yang telah Allah Swt ciptakan di muka bumi. Firman Allah Swt dalam al-Qur`an Surat al-Imran ayat 190-191 tentang segala Allah ciptakan memiliki potensi dan besar manfaatnya untuk semua makhluk hidup, terutama manusia:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَى الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١)

Artinya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”, (190) “Yaitu orang-orang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”, (191).

Dari surat di atas diperoleh keterangan bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi (beserta semua yang ada di dalamnya/diantara keduanya) dengan sia-sia, itu menunjukkan bahwa semua ciptaan Allah itu pasti bermanfaat. Berangkat dari paradigma itulah sebuah masyarakat harus bisa memanfaatkan potensi yang ada taupun membuka potensi itu sendiri baik itu potensi yang bersumber dari alam atau lingkungan, potensi sumber daya ekonomi maupun sumber daya manusia.

Indonesia memiliki kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah mulai dari rempah-rempah sampai dengan minyak bumi serta didukung dengan lautan dan ribuan pulau dan danau yang mengelilinginya. Berbagai kekayaan suberdaya alam yang dimilikinya menjadi potensi tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk dikembangkan terutama dibidang alamnya. Dalam pandangan Islam pengembangan merupakan gerakan tanpa henti yang harus terus menerus diberdayakan dengan pengembangan paradigma ditengah-tengah masyarakat, hal ini sejalan dengan pradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau pengembangan.

Pengembangan adalah upaya meperluas horizon pilihan bagi masyarakat serta memberikan ruang yang bebas agar masyarakat dapat berkembang dengan kemampuannya yang maksimal. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk bisa melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Pemberdayaan dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan yang berbasis pada kekuatan atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, melalui optimalisasi daya dan meningkatkan posisi tawar yang mereka miliki. Pemahaman tersebut mengandung makna bahwa pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama, sementara pihak luar seperti pemerintahan, perusahaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang berkepentingan dipandang sebagai modal pelengkap (Chabib Soleh, 2014;78).

Dalam pengembangan pariwisata tidak hanya pemerintah yang melakukan sendiri tetapi pihak-pihak lain juga ikut andil dalam pembangunan infrastruktur pendamping, ini guna meningkatkan pendapatan dari sektor ekonominya. Menurut

Charles Kaiser Jr. Dan Larry E. Helber dalam bukunya menjelaskan tingkat-tingkat perencanaan pariwisata itu dimulai dari pengembangan pariwisata daerah yang mencakup pembangunan fisik objek dan atraksi wisata. Setelah itulah dilakukan, kita akan dapat melihat bagaimana perkembangan dari jumlah berkunjung wisatawan apabila ternyata mencapai target yang telah ditetapkan selanjutnya akan memikirkan sistem prioritas. Untuk pengembangan ini perlu dilakukan pendekatan-pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada (pemerintah dan swasta) dan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata daerah tersebut.

Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.

Di samping itu pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan yang perlu dikembangkan karena dari sektor ini dapat meningkatkan devisa negara menghasilkan sektor ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan standar hidup serta menstimulasikan faktor-faktor produksi lainnya. Oleh karena itu muncul kegiatan-kegiatan ekonomi dalam suatu daerah pariwisata seperti hotel, penginapan, biro

perjalanan, restoran, industri kerajinan, *art shop*, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Keberadaan destinasi wisata harus didukung oleh semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat yang berada disekitar kawasa wisata serta pihak swasta sebagai pihak penanam modal karena secara finansial wisata akan menguntungkan bagi penanam modal, penyelenggara dan secara langsung dapat lebih mensejahterakan masyarakat disekitarnya.

Sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan salah satunya Wisata Halal yang memiliki potensi besar dari berbagai aspek kehidupan. Pulau Lombok menjadi salah satu destinasi wisata karena keindahan alam serta banyaknya objek wisata yang ada di Pulau Lombok seperti wisata alam, wisata pantai, wisata budaya, dan wisata kuliner. Salah satu destinasi wisata yang disukai wisatawan adalah objek wisata pantai, beberapa pantai di Pulau Lombok yang cukup terkenal antara lain Pantai Senggigi, Pantai Kuta Lombok, dan Pantai Pink. Selain pantai, wisata alam seperti Gunung Rinjani yang merupakan gunung tertinggi ke-3 di Indonesia juga merupakan salah satu destinasi wisata. Beberapa objek wisata yang ada di Pulau Lombok antara lain Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Gili Kendis, Gili Nanggu, Gunung Rinjani, Air Terjun Benang Kelambu, Air Terjun Tiu Kelep, dan lain-lain.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, M. Zainul Majdi sangat mendukung terlaksananya pariwisata halal di NTB. Dalam sambutannya pada sebuah seminar di Hotel Lombok Raya Juni 2015, Gubernur mengajak seluruh komponen dan pemangku kepentingan seperti unsur pemerintah, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat atau pelaku Kepariwisata, pemerhati dan pengiat kepariwisataan

serta *stakeholders* lainnya untuk secara bersama-sama mengembangkan pariwisata *syariah* (*Halal Tourism*) di Nusa Tenggara Barat. “Penduduk kita Nusa Tenggara Barat mayoritas Islam, masak kalah dengan daerah lain yang penduduknya tidak mayoritas Islam, papar Gubernur”.

Kehadiran suatu industri (bisnis) atau penerapan program pemberdayaan (oleh pemerintah atau non-pemerintah) di suatu kawasan bersama teknologi dengan muatanmuatan ekonominya, akan memberikan dampak sosial berupa perubahan-perubahan dalam proses kehidupan sosial dan ekonomi pada masyarakat yang berada di industri atau program tersebut. Kehadirannya dapat menjadi ancaman potensial timbulnya kesenjangan sosial ekonomi jika tidak disertai dengan upaya memberikan pemahaman dan pelibatan kepada masyarakatnya.

Kesejahteraan masyarakat mempunyai arti sejahtera lahir maupun batin seluruh masyarakat yang berisikan unsur kualitas kehidupan beragama, tingkat pendidikan, kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, serta pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan materi dalam hidupnya. Maka sesuatu hal yang wajar bila masyarakat sangat mengimpikan sebuah kelayakan hidup yang nyaman serta hidup yang mapan, mandiri secara ekonomi, lingkungan maupun sumber daya manusianya.

Saat ini konsep wisata halal kian marak dan sedang menjadi trend di Indonesia. Hal tersebut terjadi juga dalam industri pariwisata Indonesia bagian timur, tepatnya di Provinsi NTB. Menilik industri pariwisata, penerapan *syari`ah*

sebagai cara membenahi wisata di Indonesia yang dianggap masih condong mengikuti gaya ke barat-baratan. Seperti penyediaan makanan ataupun minuman yang tidak sesuai dengan *syariat* Islam dan yang dianggap tabu di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, tentu hal ini sangat berpengaruh bagi kegiatan industri wisata.

Konsep pariwisata islami merupakan penyesuaian kegiatan wisata dengan konteks pelaksanaan *syariat* Islam. Konsep ini terkait dengan harapan agar daerah wisata di NTB dalam hal standar *syari'ah*, pariwisata halal harus memiliki akomodasi yang sesuai standar *syari'ah* meliputi: tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci; tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah; tersedia makanan dan minuman halal fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi NTB menyikapi pengembangan pariwisata halal melalui pembentukan regulasi sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaannya pada Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016.

Adanya pariwisata halal di NTB sebagai salah satu trend baru dalam dunia pariwisata memiliki dampak positif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu menambah lapangan pekerjaan, mempromosikan daerah tersebut sebagai daerah wisata dengan konsep wisata islami, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Di sisi lain, masyarakat menganggap bahwa konsep wisata islami hanya sebagai wacana belaka dari pemerintah daerah. Hal itu karena, sektor pariwisata selama ini diasumsikan sebagai aktivitas yang cenderung bertentangan dengan

syariat Islam dan sebagai ”program impor” dari “Barat”, sehingga sebagian masyarakat cenderung apatis (tidak mau tahu) meresponsnya. Untuk itu perlu adanya penyiapan masyarakat, termasuk untuk mengubah proses pengembangan pariwisata terkait dengan sosialisasi dan menumbuhkan pemahaman masyarakat akan kegiatan pariwisata yang dikembangkan di NTB.

Syariat Islam sebagai potensi pariwisata, dalam hal ini dimaksudkan bahwa pariwisata dengan berlandaskan pada konsep yang islami bukan berarti membatasi kegiatan wisatawan yang non-muslim. Hal ini perlu adanya toleransi dan kompensasi dalam penyediaan kegiatan-kegiatan wisata yang dapat mengakomodasi kegiatan wisatanya. Namun dalam hal ini harus diterapkannya konsep bahwa *syariat* Islam sebagai konservasi, artinya ada usaha untuk menjadikan industri pariwisata yang ada agar sesuai dengan pokok-pokok aturan Islam.

Provinsi NTB sedang giat-giatnya memperkenalkan konsep pariwisata halal yang dimiliki. Salah satu bukti keseriusannya dengan menerbitkan perda pariwisata halal. Selain menjadi hal yang baru dalam dunia pariwisata, konsep tersebut masih terdengar sangat asing bagi sebagian wisatawan ketika berkunjung ke destinasi-destinasi wisata halal tersebut. Sehingga penyusun tertarik untuk melihat lebih jauh lagi terkait regulasi konsep pariwisata halal ini dengan mengambil judul “PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA HALAL (HALAL TOURISM) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dalam melakukan sebuah penelitian penulis mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pengembangan Destinasi Wisata Halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengembangan Destinasi Wisata Halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.?
3. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah adanya program pengembangan Destinasi Wisata Halal.?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Mengetahui upaya pemerintah melalui pengembangan destinasi Wisata Halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Agar Mengetahui faktor pendukung dan penghambat program pengembangan Destinasi Wisata Halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah adanya program pengembangan Destinasi Wisata Halal

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dalam dua katagori, yaitu kegunaan akademik dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Secara Akademis

Secara Teoritis atau Akademik, hasil penelitian ini dapat berguna dalam penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang dakwah dalam hal ini pemberdayaan masyarakat kearah perubahan-perubahan dan menjadi rujukan bagi disiplin ilmu yang hendak meneliti hal yang sama.

1.4.2 Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini menjadi salah satu yang dapat dijadikan tolak ukur untuk penelitian yang mendalam, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda. Dengan demikian diharapkan secara berangsur-angsur pembendaharaan informasi yang sistematis tentang Wisata Halal Lombok dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk meneruskan teori yang lebih mendalam dan penelitian yang lebih lanjut.

1.5 Landasan Pemikiran

Landasan pemikiran adalah sebuah penelitian kualitatif yang sifatnya bisa berubah-ubah. Namun untuk menguji kelayakan dan kesesuaian harus adanya perbandingan dari beberapa aspek, Setelah melakukan penelusuran terhadap hasil-

hasil penelitian khususnya skripsi, penulis menemukan beberapa skripsi maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, di antaranya:

1.5.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

Setelah melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian khususnya skripsi, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Denda Yulia Asih Rismawanti dengan judul “*Place Branding dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Terbaik*”. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini membahas tentang place branding Pulau Lombok yang dilakukan oleh Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB sebagai daerah yang dinobatkan menjadi destinasi wisata halal terbaik Indonesia. Hasilnya, place branding Pemerintah DISBUDPAR NTB berjalan sesuai yang direncanakan dan berhasil meningkatkan jumlah wisatawan yang datang berkunjung. Place branding wisata halal ini sesuai dengan 5 konsep teori place branding Robert Govert dan memenuhi kriteria wisata halal GMTI. Namun, kelemahan wisata Lombok yaitu kurangnya SDM dengan SDA yang lengkap membuat keduanya tidak sepadan, hal tersebut menjadi pekerjaan bersama baik bagi Pemerintah NTB, pengelola usaha, serta masyarakat dan Pemerintah Pusat untuk membantu agar terealisasi dengan baik.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ariqa Nurwilda Sugiarti dengan judul “Strategi Pengembangan Pariwisata Syari`ah Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara di kota Bandung”. Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor internal, eksternal dan strategi pengembangan pariwisata syari`ah di kota Bandung. Kesimpulannya, potensi pasar wisata syari`ah di Bandung besar sekali, tetapi belum banyak pelaku usaha yang sadar akan potensi tersebut karena wisata syari`ah terkesan eksklusif hanya untuk satu orang muslim. Persepsi inilah yang dijadikan klarifikasi terhadap pengembangan konsep dan prinsip wisata syari`ah, agar pasar tidak hanya terbatas karena perbedaan keyakinan.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Harjanto Suwardono dengan judul “Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus yang dianalisis berdasarkan fakta yang terjadi dengan kerangka teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengembangan pariwisata perhotelan melalui pengujian keseimbangan *supply-demand* di kota Semarang. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penambahan jumlah kamar pada hotel berbintang dan upaya perubahan hotel non berbintang dari konvensional menjadi syari`ah agar tercipta titik keseimbangan (*equilibrium*), sehingga akan diperoleh biaya operasi minimum dengan penghasilan yang optimal.

keempat, Jurnal yang disusun oleh Hafizah Awalia, mahasiswi Universitas Airlangga Studi Komunikasi tahun 2017 yang berjudul “Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia”. Jurnal ini secara umum membahas wisata Islam di Indonesia kemudian mengerucut untuk meneliti Wisata Halal di Pulau Lombok NTB.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Kurniawan Gilang Widagdyo dengan judul “*Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat pengembangan potensi wisata *syari`ah* di Indonesia dengan memperhatikan aspek wisatawan Timur Tengah sebagai pasar sasaran utama wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, karakteristik dan perilaku pasar sangat menentukan keberhasilan komunikasi pasar. Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang mengkaji atau menguraikan secara spesifik Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan hukum Islam tentang konsep pariwisata halal sepanjang penulis ketahui belum pernah dilakukan.

Dari beberapa skripsi dan jurnal di atas, belum ada satu sumber pun tulisan yang secara khusus meneliti tentang pengembanagn wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini ingin melengkapi penelitian yang sebelumnya, untuk kemudian dijadikan sebuah panduan khusus bagi pembaca.

1.5.2 Landasan Teoritis

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolution) dan perubahan secara bertahap.

Menurut Seels & Richey (Alim Sumarno, 2012) pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. Sedangkan menurut Tessmer dan Richey (Alim Sumarno, 2012) pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan.

Mensejahterakan masyarakat perlu adanya indikator pemberdayaan dalam-nya. Schuler, Hashemi dan Riley yang dikutip oleh Edi Suharto (2010:63) mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang disebut dengan empowerment index atau indeks pemberdayaan:

Pertama modal fisik untuk meningkatkan pemberdayaan, pengembangan modal fisik harus dilakukan. *Kedua* pengembangan modal manusia yang menjadi landasan mengembangkan pemberdayaan dan menjadi mediasi peningkatan keberdayaan masyarakat dari modal fisik. *Ketiga* pengembangan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, selain ditentukan oleh kemampuan perencanaan dan evaluasi, juga ditentukan oleh kemampuan berinteraksi antar sesama.

Berkaitan dengan topik yang diteliti penulis melakukan beberapa kajian terhadap teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, maka ada beberapa landasan teoritis yang dipakai penulis, agar melengkapi landasan-landasan sebagai acuan penelitian ini supaya penelitian ini tepat sasaran dan terarah. Hal ini tidak lepas dari kajian utama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Arthur Dunham yang mengutip dalam Sukoco (1991) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan agar

mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan. (Suharto, 2008). Lebih lanjut Suharto (2008), menyatakan bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

1. Peningkatan standar hidup, melalui perangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial dari semua pihak yang mempunyai tugas.
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan serta mampu mempertahankan kemampuan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan yang mampu mengubah kondisi masyarakat agar menjadi yang lebih mandiri;

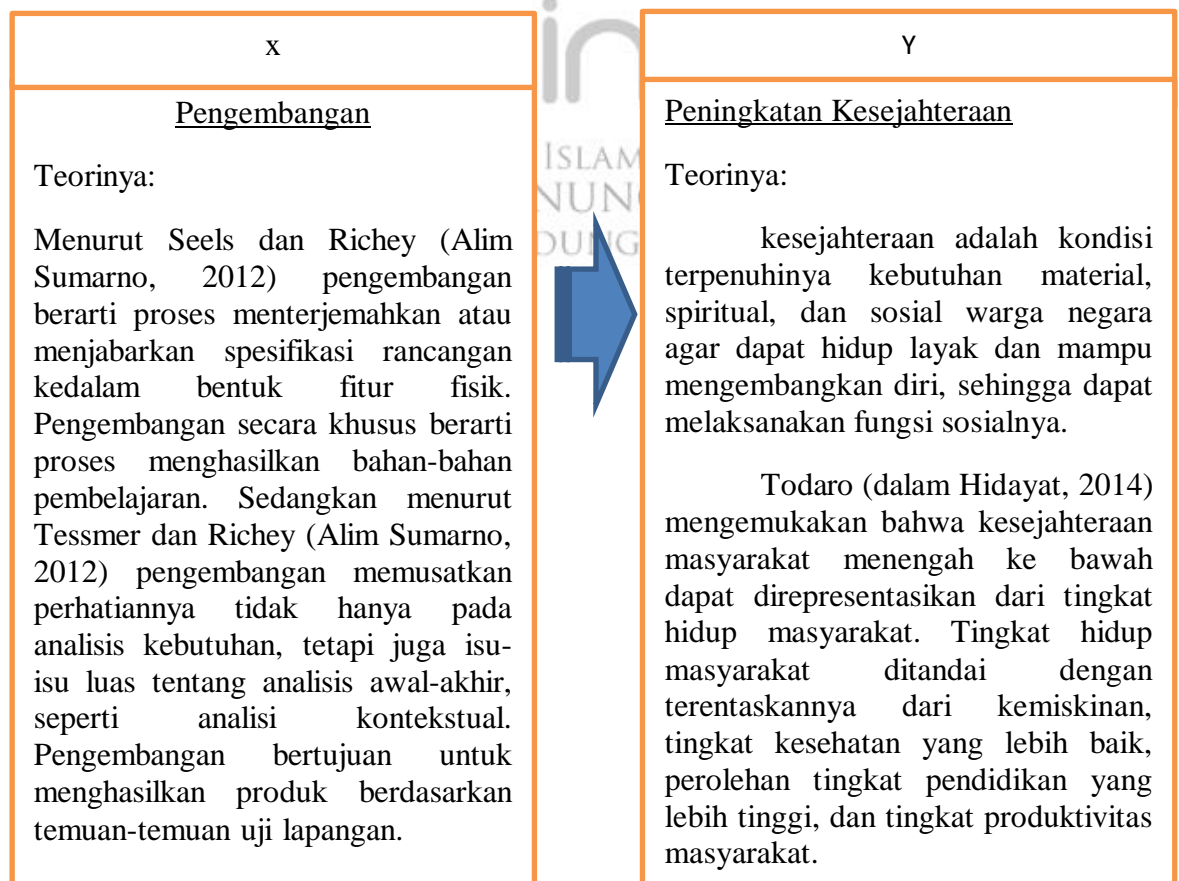
1.5.3 Karangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian menurut Sapto Haryoko dalam Iskandar (2008: 54) menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam suatu penelitian perlu

dikemukakan apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka perlu dilakukan deskripsi teoritis masing-masing variabel dengan argumentasi terhadap variasi besarnya variabel yang diteliti.

Pertama modal fisik untuk meningkatkan pemberdayaan, pengembangan modal fisik harus dilakukan. Kedua pengembangan modal manusia yang menjadi landasan mengembangkan pemberdayaan dan menjadi mediasi peningkatan keberdayaan masyarakat dari modal fisik. Ketiga pengembangan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, selain ditentukan oleh kemampuan perencanaan dan evaluasi, juga ditentukan oleh kemampuan berintraksi antar sesama.

Tabel 1. 1 Karangka Konseptual



1.6 Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sebagai langkah pertama penulis membuat out-line penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai rujukan yang kongkrit dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.
2. Selanjutnya mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
3. Menentukan Metode penelitian, yang menggabungkan antara penelitian lapangan dan landasan pemikiran.
4. Menentukan teknis analisis data, untuk mengetahui dan menganalisa masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan dua metode untuk membongkar hal tersebut. Pertama metode induktif berangkat dari fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut ditarik generalisasi menjadi sebuah sifat yang umum. Kedua metode deduktif yaitu berfikir dengan menggunakan premise-premise dari fakta-fakta yang bersifat umum ke arah khusus untuk menarik sebuah kesimpulan.

Adapun langkah-langkah penelitian secara metodologi dan prosedural, agar mendapatkan data sesuai yang diinginkan dan juga maksimal penulis menggunakan tata cara sebagai berikut:

1.6.1 Lokasi Penelitian

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Jl. Sengkol, Mertak, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83573.

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan

Pradigma adalah model teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir, atau pandangan mendasar para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan.

Dalam KBBI pendekatan adalah proses perbuatan, cara mendekati atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

1.6.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis, dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan keadaan di lapangan, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambar mengenai masalah yang ada, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bermaksud memahami fenomena tentang apa yang ada pada objek penelitian di lapangan. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata, Bahasa

atau pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode pencarian data.

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh oleh peneliti untuk menemukan, mengembangkan dan menguji pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang memanfaatkan paradigma penelitian interpretatif dengan tujuan membangun makna sesuai data yang ditemukan di lapangan, yaitu dengan prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang memaparkan data dari hasil lapangan dan wilayah yang dikunjungi. Data yang sudah terkumpul menurut jenis, sifat, dan kondisinya. Setelah data lengkap kemudian dibuat kesimpulan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti melalui emosionalitas, maksudnya pendekatan yang meliputi aspek secara personal, latar belakang kehidupannya, kepribadiannya, dan lain sebagainya. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah bersama para pelaksana pembangunan di sektor pengembangan wilayah Kawasan Ekonomi Khusus The Mandalika.

3. Metode Penentuan Subjek

Subjek penelitian ini adalah Wisata Halal yang terletak di KEK Mandalika, subjek utama yang dijadikan sumber data oleh peneliti adalah Dinas Pariwisata dan ITDC yang menjadi pelopor utama dalam pengembangan.

Cara pengambilan sampelnya adalah dengan *Snowball sampling* teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awal jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

1.6.4 Jenis Data Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. (Rakesarasin, 1996).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan *spesifik studi*.

Sumber data primer adalah *responden* individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarkan melalui internet (Uma Sekaran, 2011).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011).

1.6.5 Penentuan Informasi atau Unit Penelitian

1. Informan dan Unit Analisis

Sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti agar *validitas* dan *reabilitas* penelitian bisa terjaga, terjaga karena terkadang peneliti bingung membedakan antara subjek maupun objek penelitian.

2. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan sangat penting karena informan yang akan memberikan sumber informasi. Koentjaraningrat, (1993: 89) menyatakan bahwa penentuan informan sebagai sumber data lebih banyak menggunakan pertimbangan realitas sosial, artinya informan-informan yang mewakili masyarakat dipilih secara

purposive sampling yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Usman (2004: 47), *purposive sampling* digunakan apabila informan yang dipilih secara khusus berdasarkan maksud dan tujuan penelitian.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa langkah, yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang secara langsung, untuk memperoleh data yang jelas dan juga real di lapangan. Adapun observasi yang dipakai oleh peneliti adalah dengan menggunakan dua cara yaitu bersifat partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah peneliti terlibat langsung dengan kegiatan yang diamati terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang kongkrit yang digunakan sebagai sumber data peneliti. Sedangkan non partisipan adalah peneliti hanya mengamati saja tanpa terlibat langsung dengan kegiatan yang dilakukan baik ditempat maupun diluar.

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.

Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatanya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu alat indera lainnya (Burhan Bungin, 2009:115).

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara terbuka tujuan peneliti dengan tanya jawab dan bertatap muka di antara peneliti dan responden saling berhadapan. Wawancara yang digunakan peneliti adalah semi terstruktur di mana cara pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan yang terstruktur, tujuannya *responden* agar lebih terbuka dalam memberikan jawaban dan data yang peneliti inginkan baik berupa pendapat maupun ide gagasannya.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang diambil melalui dokumen-dokumen, baik itu berupa laporan maupun jumlah petani garam atau surat-surat dan catatan harian. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2010:329).

1.6.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam keabsahan data ini juga dilakukan proses triangulasi. Menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2007:372), untuk pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis yakni; triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu. Dari tiga jenis triangulasi tersebut, penulis memilih keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian. Dengan demikian analisis data menggunakan metode *triangulation observers*.

1.6.8 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum masuk lapangan, selama dan setelah selesai dilapangan.

1. Analisis Sebelum Lapangan

Peneliti sudah melakukan analisis data sebelum terjun lapangan berupa studi pendahuluan atau sekunder, untuk menentukan fokus penelitian, penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan dan terus mengembangkan hasil-hasil dari penemuan di lapangan sebelum melakukan penganalisisan secara khusus kepada pihak pengembang dan pembangun kepariwisataan tersebut.

2. Analisis Di lapangan

Analisis di lapangan berlangsung sejak pengumpulan data pada saat observasi dan wawancara peneliti sudah dapat menganalisa terhadap apa yang ditemukan dari hasil pengamatan dan wawancara.

3. Analisis Setelah Lapangan

Analisis setelah lapangan peneliti menyaring dimana data yang masuk pada poin-poin tertentu supaya tidak terjadi kerancuan dalam penyusunan data yang ditemukan.

1.6.9 Rencana Jadwal Penelitian

tabel 1. 2 Rencana Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/2018						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Tahap persiapan penelitian							
	a. Penyusunan dan pengajuan judul							
	b. Pengajuan proposal							
	c. Perijinan penelitian							
2	Tahap pelaksanaan							
	a. Pengumpulan data							
	b. Analisis data							
3	Tahap penyusunan laporan							

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Konseptual

2.1.1 Pengertian Wisata

Definisi wisata atau pariwisata menurut United Nation World Tourism Organization (UNWTO) yaitu setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 bulan (UNWTO, 2014:5).

Menurut UU No.9 tahun 1990 Tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan kepariwisataan atau wisata adalah sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek atau daya tarik.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
4. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

5. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa.

Definisi wisata memang tidak dapat persis sama di antara para ahli, hal ini memang jamak terjadi dalam dunia akademis, sebagaimana juga bisa ditemukan pada berbagai disiplin ilmu lain. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pariwisata yang dikutip dari laman www.landasanteori.com wisata, diakses 1 Mei 2016 pada 13:46 Wib). “Suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud untuk kegiatan usaha, bisnis, mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, atau bahkan hanya untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam”.

2.1.2 Pengertian Halal

Halal berasal dari bahasa arab yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu: segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara” (Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003. hal. 3) Sedang halal menurut Majelis ulama Indonesia (MUI) Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Terutama, dalam hal makanan dan minuman.

Dalam Al-qur`an Q.S. al-as`raf [7]:157 dengan terjemahan sebagai berikut:

“Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (Q.s. Al-a`raf [7] :157).

Berdasarkan pengertian halal di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian halal berdasarkan al-Qur`an dan hadis adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa maka hukumnya halal. Begitu sebaliknya, segala sesuatu yang mendatangkan mudarat (bahaya) bagi kesehatan: badan, akal, dan jiwa, hukumnya adalah haram.

2.1.3 Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah golongan masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. (Hasan Shadily 1984:47).

Menurut Mayor Polak dalam Abu Ahmadi (2003:96), menyebutkan bahwa masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok.

Sedangkan menurut Djojodiguno tentang masyarakat adalah suatu kebulatan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antar manusia dengan manusia (dalam Abu Ahmadi 2003:97).

Pendapat lain mengenai masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat menurut Abu Ahmadi (2003):

1. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan poengumpulan binatang.
2. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama dalam suatu daerah tertentu.
3. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama.

Dari penjelasan dan ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia majemuk yang tinggal dalam satu teritorial tertentu dan terdiri dari beraneka ragam kelompok yang memiliki kesepakatan bersama berupa aturan-aturan ataupun adat istiadat yang timbul dan tercipta karena kebersamaan tersebut. Adanya aturan atau adat ini sangat bergantung dengan masyarakat itu sendiri dan juga kesepakatan bersama yang timbul setelah kehidupan itu berlangsung dalam waktu yang lama.

Konsep Masyarakat menurut Edi Suharto (2006:11) adalah arena dimaa praktek pekerjaan sosial makro beroperasi. Berbagai definisi

mengenai masyarakat biasanya diterapkan berdasarkan konsep ruang, orang, interaksi dan identitas. Dalam arti sempit istilah masyarakat merujuk pada sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu seperti desa, kelurahan, kampung atau rukun tetangga. Dalam arti luas, masyarakat menunjuk pada interaksi kompleks sejumlah orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama meskipun tidak bertempat tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu. Masyarakat seperti ini bisa disebut sebagai *societas* atau *society*. Misalnya, masyarakat ilmuwan, masyarakat bisnis, masyarakat global dan masyarakat dunia.

Kemasyarakatan atau keadaan dimana terdapat kehadiran orang lain disisi kita, kehadiran itu bisa nyata kita lihat dan kita rasakan, namun juga bisa hanya dalam bentuk imajinasi. Setiap kita bertemu orang meskipun hanya melihat atau mendengarnya saja, itu termasuk situasi sosial. Begitu juga ketika kita sedang menelfon, atau chatting, bahkan setiap kali kita membayangkan adanya orang lain.

Misalkan melamunkan pacar, mengingat ibu bapa, menulis surat pada teman, membayangkan bermain sepakbola bersama, mengenang tingkah laku buruk di depan orang, semuanya itu termasuk sosial. Sekarang, coba kita ingat-ingat situasi dimana kita betul-betul sendirian. Pada saat itu kita tidak sedang dalam pengaruh siapapun. Bisa dipastikan kita akan mengalami kesulitan menemukan situasinya. Jadi, memang benar kata Aristoteles, sang filsuf Yunani, tatkala mengatakan bahwa

manusia adalah makhluk sosial, karena hampir semua aspek kehidupan manusia berada dalam situasi sosial.

2.1.4 Pengertian Destinasi Wisata Halal

2.1.4.1 Definisi Wisata Halal

Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya Hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita.

Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat selain tentunya tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan. Hingga 2015, pertumbuhan industri pariwisata halal dapat dikatakan sebagai pertumbuhan terbesar dibandingkan dengan jenis pariwisata lainnya yang di bidang kepariwisataan harus mempunyai bentuk atau varian baru agar mampu menarik wisatawan lebih banyak.

2.1.4.2 Karakteristik Wisata Halal

Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) diakses melalui <http://gmti.crescentrating.com>, diakses 18 agustus 2015, pada 18:22 Wita), yang dipublikasikan pada bulan Maret 2015 lalu dan melingkupi 100 destinasi wisata di seluruh dunia. Pada GMTI 2016, terdapat peningkatan jumlah destinasi menjadi 130 destinasi dan penambahan dua kriteria baru yaitu transportasi udara dan peraturan visa.

Berikut ini merupakan 3 tema penilaian GMTI 2016 Destinasi yang aman dan ramah untuk aktifitas liburan keluarga. Fasilitas dan pelayanan yang ramah muslim Pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata halal yaitu:

a. Destinasi yang aman dan ramah untuk aktifitas liburan keluarga

1. Destinasi wisata yang ramah keluarga.
2. Keamanan secara umum maupun khusus untuk wisatawan muslim.
3. Jumlah kunjungan muslim.

b. Fasilitas dan pelayanan yang ramah muslim

1. Pilihan dan jaminan kehalalan makanan
2. Fasilitas sholat
3. Fasilitas bandara dan Pilihan akomodasi

c. Pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata halal

1. Kemudahan berkomunikasi
2. Kesadaran tentang kebutuhan wisatawan muslim dan usaha untuk memenuhinya.
3. Transportasi Udara.
4. Persyaratan Visa

Kriteria menurut GMTI 2016 diatas peneliti gunakan dalam menganalisis wisata halal Lombok, yang dikembangkan Pemerintah NTB.

2.1.5 Tujuan Pengembangan Destinasi Wisata Halal

Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 yang dikutip dari buku Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata oleh Oka A. Yoeti (1997 : hal 35) dikatakan bahwa:

Secara umum Tujuan pengembangan kepariwisataan adalah:

1. Meningkatkan pendapatan devisa pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industry penunjang dan industry sampingan lainnya.
2. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan aalam dan kebudayaan Indonesia.
3. Meningkatkan persaudaraan nasional dan internasional

Secara khusus tujuan pengembangan destinasi wisata halal sebagai berikut:

1. Mengembangkan wilayah wisata yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Untuk membuat sebuah wisata baru agar wisatawan dapat memilih sesuai dengan keinginannya
3. Memanfaatkan wilayah wisata yang kurang di kelola menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ummat (KEK).
4. Memperluas tempat-tempat pengembangan sumber daya manusia.
5. Meningkatkan spritualitas dengan cara menghibur.
6. Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama.
7. Membuat turis tertarik pada obyek sekaligus membangkitkan spirit religi wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia.
8. Menjadi bagian yang menyatu dengan obyek pariwisata, ritual ibadah menjadi bagian paket hiburan.
9. Integrated, interaksi berdasar pada prinsip syariah

2.1.6 Konsep Pengembangan Destinasi Wisata Halal

Secara khusus, pariwisata halal merupakan kegiatan perdagangan atau bisnis (pariwisata halal). Dalam literatur Islam, istilah "halal" merujuk

pada semua yang diperintahkan dalam ajaran agama dan menjadi landasan bagi perilaku dan kegiatan umat Islam (Diyanat Isleri Baskanlig, 2011). Secara khusus, halal digunakan untuk pengertian semua yang dapat dikonsumsi menurut al-Quran atau Hadis Nabi (Gulen, 2011). Istilah sebaliknya adalah "haram" yang mengacu pada tindakan pelanggaran atas ajaran agama oleh umat Islam. Oleh karena itu, seorang muslim diwajibkan untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang halal dan menghindari hal-hal yang diharamkan agama.

Kata “halal” berarti sesuatu yang diizinkan dan biasanya digunakan untuk pengertian sah. Konsep halal dalam Islam memiliki motif yang sangat spesifik seperti untuk melestarikan kemurnian agama, untuk menjaga mentalitas Islam, untuk mempertahankan hidup, untuk melindungi properti, untuk melindungi generasi masa depan, untuk menjaga harga diri dan integritas. Juga, definisi halal mengacu pada semua aspek kehidupan seperti perilaku yang diperbolehkan, ucapan, pakaian, perilaku, cara dan diet (Ijaj, 2011).

Sebagai konsekuensi yang tumbuh dari pasar terkait konsumsi yang halal, maka dari sisi demografi konsumen Muslim memfokuskan pada ketentuan ini. Konsumsi yang halal memberikan pengaruh dalam membuka kemungkinan cakrawala baru. Perusahaan-perusahaan besar yang bersifat multinasional mampu memproduksi minuman ringan, permen karet, dan suplemen kesehatan, vaksin, susu formula, bahan dan banyak lagi. Konsumsi halal menargetkan sebagai segmen pemasaran

baru. Selain itu, produk halal bagi konsumen memberikan ruang untuk oleh semua orang sebagai perkumpulan global di sekitar topik ini (Md. Aminul Islam and Laura Kärkkäinen, 2013).

Dengan demikian, istilah wisata halal sebagaimana disosialisasikan dalam Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober - 2 November 2013 di Gedung Pusat Niaga, JIExpo (PRJ), Jakarta (Rabu, 30/10/2013), President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, menjelaskan bahwa, “wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim”. Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita (Wuryasti, 2013).

Pariwisata halal di Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik sebagai bagian dari industri pariwisata nasional. Industri wisata ini bertujuan bukan hanya memberikan aspek material dan psikologis bagi wisatawan itu sendiri, melainkan juga memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan pemerintah. Wisata halal ini tidak bersifat eksklusif, namun inklusif bagi semua wisatawan (Muslim dan Non-Muslim). Inti dari wisata halal menekankan prinsip-prinsip syari’ah dalam pengelolaan pariwisata dan pelayanan yang santun dan ramah bagi seluruh wisatawan

dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, untuk mewujudkan Indonesia sebagai kiblat wisata halal dunia, maka strategi pengembangannya diarahkan pada pemenuhan indeks daya saing pariwisata sebagai indikator-indikator utamanya, antara lain melakukan pembenahan infrastruktur, promosi, penyiapan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata.

2.1.7 Landasan Pengembangan Destinasi Wisata Halal

Pembangunan kepariwisataan halal sebagai salah satu sektor pembangunan yang mendukung pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dalam rangka mendukung terwujudnya percepatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha, memperoleh manfaat dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global dengan tetap memperhatikan sistem nilai budaya yang berlaku di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. (Wawancara dengan Narasumber atas nama Ruslan Turmudzi, Anggota DPRD Provinsi NTB, 2017) Sila Peratama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang secara filosofis mempengaruhi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menyambut dan memperlakukan tourism (tamu) sesuai dengan konsep Islam yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika yang hidup di masyarakat berhubungan dengan konsep halal dan haram. Prinsip halal bagi masyarakat NTB diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dipandang sebagai hukum makanan apa

saja yang boleh dikonsumsi oleh tourism (tamu) sesuai keyakinannya, konsuekensinya adalah perlindungan konsumen. (Wawancara dengan Narasumber atas nama Heriadi, Sekretaris LPPOOK MUI NTB, 2017).

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 merupakan atribusi dan delegasi dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 12 ayat (3) huruf b dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Pariwisata halal merupakan ciri khas kedaerahan (muatan lokal) di Nusa Tenggara Barat yang masih di pertahankan perkembangannya sampai saat ini melalui pengembangan kepariwisataan baru agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tekhnis Penyusunan Perda Pariwisata Halal melalui tiga tahap yaitu terencana, terpadu dan sistematis. Terencana merupakan skala waktu (jangka panjang, menengah dan pendek), dalam rangka menterjemahkan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sedangkan terpadu merupakan pelibatan berbagai instansi dan pemangku kepentingan agar dapat menampung berbagai aspirasi dan permasalahan yang berkembang dan sistematis yang merupakan disusun berdasarkan kajian yang dikaitkan secara substantif dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan yang lebih tinggi untuk menghindari komplikasi.(Setiadi, 2017).

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengembangan

2.2.1.1 Pengertian Pengembangan

Pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Selain itu pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depan mereka.

Menurut Gordon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam, pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang difokuskan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dalam pengembangan masyarakat, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu.

Sedangkan menurut Twelvetreets pengembangan masyarakat adalah *“the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.”* Artinya upaya untuk membantu orang-orang dalam meningkatkan kelompok mereka sendiri dengan cara melakukan usaha bersama-sama.

Maka dari itu, pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memungkinkan individu maupun kelompok masyarakat untuk dapat memecahkan masalah-masalah sosial serta memiliki

pilihan nyata yang menyangkut masa depannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

2.2.1.2 Tujuan Pengembangan

Tujuan umum pengembangan masyarakat dapat menentukan proses dan orientasi pengambilan keputusan keberlanjutan kegiatan pengembangan masyarakat. Beberapa tujuan umum dari pengembangan masyarakat yaitu:

- a. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, kemiskinan absolut.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih berkeadilan. Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya.
- c. Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata.
- d. Meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di desa maupun kota.
- e. Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.
- g. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

- h. Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumber daya lokal.
- i. Mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk kecemasan sekaligus kekhawatiran warga yang rentan terkena ancaman kerawanan pangan dan kegagalan panen.
- j. Memperkuat daya saing masyarakat di pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional yang kompetitif.
- k. Mengurangi angka pengangguran Meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi warga grass roots.
- l. Meningkatkan jaminan sosial bagi warga miskin dan korban bencana alam.
- m. Meningkatkan peluang kerja produktif berbasis ekonomi kerakyatan.
- n. Mengembangkan fungsi kelembagaan lokal untuk pemberdayaan warga grass roots.
- o. Membangun masyarakat kreatif dan komunikatif dalam mengakses ragam informasi pembangunan inovatif.
- p. Memperkuat kesadaran masyarakat agar tidak bergantung pada pihak donor atau pemberi dana bantuan.

2.2.1.3 Model Pengembangan

Jack Rothman mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang pengembangan masyarakat yaitu:

a. Pengembangan masyarakat lokal (*locality development*)

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

b. Perencanaan social

Perencanaan sosial dimaksudkan untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi).

c. Aksi sosial

Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*), sumber (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*). Pendekatan ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi korban ketidakadilan struktur. Mereka miskin sebab dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-

sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk merubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*).

Model pengembangan masyarakat juga diterapkan dalam ruang organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam kegiatan pengembangan masyarakat LSM menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu:

a. *The Welfare Approach*

Pendekatan ini dilakukan dengan memberi bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu contohnya kepada mereka yang terkena musibah. Pendekatan ini kebanyakan dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan berupa pelayanan kesehatan, penyediaan makanan dan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

b. *The Development Approach*

Pendekatan yang dilakukan dengan cara memusatkan kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan dengan tujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Pendekatan ini dijalankan melalui program pendidikan

dan latihan bagi tenaga NGOs dan pemerintah yang berkecimpung pada bidang pengembangan masyarakat.

c. The Empowerment Approach

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Pendekatan empowerment approach bertujuan untuk memperkuat posisi tawar masyarakat lapis bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan pada setiap bidang dan sektor kehidupan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melindungi dan membela pihak yang lemah.

2.2.1.4 Menejemen Pengembangan

Program-program pengembangan masyarakat secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapis bawah. Pengembangan masyarakat secara umum diaktualisasikan dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai langkah penanganan program kemasyarakatan. Program pengembangan masyarakat umumnya menekankan penerapan community-based management (CBM). Yaitu pendekatan pengelolaan program yang menjadikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasarnya. CBM diartikan sebagai suatu strategi untuk mewujudkan praktik pembangunan yang berpusat pada manusia, pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan

sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Mereka sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan, aspirasi dan membuat keputusan demi mencapai kesejahteraan yang diimpikan.

Kebanyakan pekerja sosial menyusun kegiatan pengembangan masyarakat melalui beberapa langkah secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Ada enam tahap dalam melakukan perencanaan program diantaranya yaitu:

Pertama, tahap *problem posing* (pemaparan masalah) yang dilakukan aktivis dengan mengelompokkan dan menentukan masalah-masalah serta persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dari kelompok sasaran. Masyarakat pada umumnya menyadari permasalahan yang dihadapi. Namun, hal itu tidak diungkapkan. Peran pekerja sosial dalam tahapan ini adalah memberi penjelasan, informasi dan memfasilitasi kegiatan musyawarah atau diskusi diantara warga dari kelompok sasaran.

Kedua, tahap *problem analysis* (analisis masalah). Tahap ini pekerja sosial mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran, dan ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga dan

menjadikan informasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketiga, tahap penentuan tujuan (aims) dan sasaran (objectives). Tujuan menunjuk pada visi, tujuan jangka panjang, dan statement tentang petunjuk umum. Contoh visi pengembangan masyarakat yang dirumuskan oleh pekerja sosial adalah pembentukan masyarakat dimana seluruh warganya terlibat secara aktif dalam program untuk mempertahankan sistem lingkungan dan membuat faktor sosial, ekonomi dan politik yang ada dapat menjamin persamaan secara maksimal dikalangan warga untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar dan pelayanan. Sementara sasaran lebih bersifat khusus dibandingkan tujuan. Pekerja sosial menetapkan apa yang menjadi kepercayaan dan apa yang akan dicapai kemudian menyusun proses dan tugas-tugas khusus. Sasaran yang ditetapkan terdiri atas kegiatan kegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis dan dapat diungkapkan secara jelas kepada warga. Sasaran mungkin berjangka panjang, menengah dan pendek. Sasaran jangka panjang secara umum menuntut sejumlah strategi berbeda-beda dan sering disusun dalam berbagai hal. Sasaran jangka menengah dan pendek berskala lebih kecil lagi. Untuk memahami tujuan dan sasaran jangka panjang, menengah dan pendek dipahami dari sesuatu yang luas ke spesifik, dari yang abstrak ke kongkrit.

Keempat, tahap *action plans* (perencanaan tindakan). Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan kegiatan perencanaan berbagai aksi untuk mencapai tujuan. Dalam merencanakan aksi, pekerja sosial memerhatikan tenaga kerja, peralatan, jaringan sosial, dana, tempat, informasi, waktu tersedia, faktor-faktor penghambat, faktor-faktor pendukung, permasalahan-permasalahan stakeholder, tugas-tugas nyata yang dilakukan, pihak-pihak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil, pemain-pemain kunci baik secara individual dan kelompok, dilema atau kontradiksi atau ketegangan antara alat dengan tujuan dan hasil-hasil yang mungkin dicapai.

Kelima, tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang telah dirancang. Para aktivis ketika berada dalam tahapan ini dituntut untuk memperhatikan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari aksi yang dilakukan.

Keenam, tahap evaluasi yang dilakukan oleh pekerja sosial secara terus menerus sesuai waktu yang telah ditentukan, baik secara formal maupun semi formal pada akhir proses pengembangan masyarakat maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan, dan bahkan harian dan bisa juga dikatakan pengembangan jangka Panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang merupakan waktu-waktu untuk melaksanakan pengembangan.

2.2.1.5 Strategi Pengembangan

Secara umum ada empat strategi pengembangan masyarakat yaitu:

a. *The growth strategy*

Strategi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis. Melalui pendapatan perkapita penduduk, produktivitas pertanian, permodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama di pedesaan.

b. *The welfare strategy*

Strategi kesejahteraan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat disertai dengan pembangunan kultur dan budaya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sikap ketergantungan kepada pemerintah.

c. *The Responsitive Strategy*

Strategi ini dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (self need and assistance) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan yang di temukan oleh masyarakat bersama penyelenggaraan bantuan tersebut agar mampu membentuk strategi terbaik untuk memecahkan masalah.

d. *The Intergrated or Holistic Strategy*

Konsep perpaduan dari unsur-unsur pokok etika strategi di atas menjadi alternatif terbaik. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang dibutuhkan yaitu mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat.

2.2.2 Kesejahteraan

2.2.2.1 Pengertian Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Keluarga sejahtera lebih sedikit dari keluarga pra-sejahtera, pendapatan per kapita keluarga prasejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, pendapatan keluarga sejahtera dan prasejahtera lebih tinggi dari kriteria kemiskinan. Persentase pengeluaran pangan keluarga prasejahtera lebih besar dari keluarga sejahtera, pengetahuan gizi ibu dari keluarga prasejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, status gizi balita baik dari keluarga sejahtera lebih baik dari status gizi balita keluarga pra-sejahtera. Dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi di keluarga, khususnya menyoroti perilaku altruistik dari sebagian anggota keluarga dari sudut pandang ahli ekonomi terhadap perilaku konsumsi di keluarga.

Anggota keluarga altruistik melakukan serangkaian perilaku pengorbanan yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan bagi anggota lainnya dalam keluarga. Hasil kajian sebaliknya menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya bagi anggota keluarga yang egoistik berakibat terhadap penurunan kesejahteraan anggota keluarganya, khususnya yang altruistik. Sedang Narayan, et al., (2000) mengkaji kemiskinan (poverty) di berbagai negara serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam kajian tersebut digunakan beberapa konsep atau istilah kesejahteraan sebagai sisi lain pengukuran kemiskinan seperti kesejahteraan material dan kesejahteraan psikologi.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk

kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial (Suharto, 2008).

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert dan Hahnel, dalam Sugiarto 2007):

1. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.
2. Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.
3. Pendekatan *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan *new contractarian approach* ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya

untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan.

2.2.2.2 Tujuan kesejahteraan

Menurut Fahrudin (2012:10) Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Schneiderman (1972) dalam Menurut Fahrudin (2012:10) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan system, pengawasan system, dan perubahan system.

1. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang

bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun di masyarakat. Kegiatan system kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan system rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

2. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

3. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu system yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu sistem

kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

2.2.2.3 Konsep kesejahteraan

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan didisiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat-masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang teroganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan sebuah konsep yang relative baru berkembang. Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik dan banyak orang yang yang menamainya sebagai kegiatan amal. Di Amerika Serikat kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai bantuan public yang dilakukan oleh pemerintah bagi keluarga miskin. Para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi

rendahnya tingkat hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Rukminto (2005:17), Kesejahteraan sosial adalah:

Suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.

Pengertian di atas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup melalui sebuah pengelolaan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat terdorong dan bisa mencapai keadaan kehidupan yang lebih baik lagi. Merujuk kepada Undang-Undang No.11 tahun 2009 yang dikutip oleh Suharto (2009:153) mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya”.

Adanya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu materil, spiritual, dan sosial sehingga akan mendorong masyarakat menuju ke arah kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya. Dalam hal ini peran dari tanggung jawab pemerintah dalam

peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakatnya harus ditingkatkan.

Ilmu kesejahteraan sosial merupakan kelanjutan dan sebuah penyempurnaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh Karena itu latar belakang sejarah dari ilmu kesejahteraan sosial pada titik awal masalah sama dengan pekerjaan sosial. Adapun definisi pekerjaan sosial menurut Internasional Federation of Social Workers (IFSW) (2000) yang dikutip oleh Adi (2005:12) adalah:

"The social worker profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with the environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work".

Profesi pekerjaan sosial mendorong agar terciptanya perubahan sosial, membantu dalam pemecahan masalah pada relasi manusia, serta memberdayakan dan membebaskan manusia untuk mencapai derajat suatu kehidupan yang lebih baik. Upaya yang dilakukan tersebut dilakukan dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial. Pekerjaan sosial mengintervensi ketika seseorang sedang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja sosial.

Pekerjaan sosial adanya kegiatan pemberian pelayanan sosial agar individu mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat sebagai

biasanya. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Zastrow yang dikutip oleh Huraerah (2011:38) yang mengatakan definisi pekerjaan sosial adalah:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut, permasalahan dalam bidang pekerjaan sosial erat kaitannya dengan masalah sosial yang dihadapi baik oleh individu, kelompok dan juga masyarakat. Peran pekerja sosial mampu mengatasi semua bentuk permasalahan dan fenomena sosial tersebut dengan melihat prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial serta mampu memperbaiki kualitas hidup dan mampu mengembalikan fungsi sosialnya kembali di masyarakat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai paranan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

1. Rasa Aman
2. Kesejahteraan
3. Kebebasan
4. Jati diri

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga;
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
3. Tingkat pendidikan keluarga;
4. Tingkat kesehatan keluarga, dan;
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *materi*, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *fisik*, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *mental*, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *spiritual*, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Kondisi (KEK) Mandalika

Terletak di bagian Selatan Pulau Lombok, KEK Mandalika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KEK Pariwisata. Dengan luas area sebesar 1.035,67 Ha dan menghadap Samudera Hindia, KEK Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial.

KEK Mandalika menawarkan wisata bahari dengan pesona pantai dan bawah laut yang memukau. Mandalika berasal dari nama seorang tokoh legenda, yaitu Putri Mandalika yang dikenal dengan parasnya yang cantik. Setiap tahunnya, masyarakat Lombok Tengah merayakan upacara Bau Nyale, yaitu ritual mencari cacing laut yang dipercaya sebagai jelmaan dari Putri Mandalika. Perayaan ini merupakan budaya yang unik dan menarik wisatawan baik lokal maupun internasional.

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) yang telah mengembangkan Nusa Dua Bali mengusulkan pembentukan KEK Mandalika. Sebagai destinasi wisata bahari dan wisata budaya dengan panorama yang eksotis dan berdekatan dengan Pulau Dewata, KEK Mandalika diperkirakan akan menarik

kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara per tahun pada 2019. KEK Mandalika memiliki konsep pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dengan pembangunan obyek-obyek wisata dan daya tarik wisata yang selalu berorientasi kepada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat. KEK Mandalika adalah KEK yang paling menarik bagi para investor saat ini dan diharapkan menjadi destinasi wisata kelas dunia.

3.1.2 Perkembangan wisata Halal KEK Mandalika

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah diatur pewilayahan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) menjadi Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Lombok. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD). Untuk mewujudkan visi pariwisata NTB, Pulau Lombok dijadikan sebagai destinasi wisata yang diharapkan menjadi pintu gerbang untuk menarik kunjungan wisatawan, terutama wisatawan muslim, terlebih dalam konteks wisata halal, Lombok dinobatkan sebagai wisata halal terbaik dunia dua tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2015 dan tahun 2016 di Abu Dhabi, maka dari itu beberapa langkah strategis yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata Lombok sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).

Lombok dalam rencana strategis pariwisata daerah NTB dibagi menjadi dari 4 (empat) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) (<http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/sosialisasi-ripparda-ntb/>). Salah satu

dari empat Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Lombok adalah RASIMAS-KEK MANDALIKA dan sekitarnya, meliputi Benang Stokel, Benang Kelambu; Gili Kondo, Bukit Pegansingan, Gili Sulat; KEK Mandalika; Gunung Rinjani; dan Otak Kokoq, Pantai Mawun, Bukit Tunak. Kawasan ini berada pada wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, dan diperuntukkan sebagai kawasan wisata agro, wisata pegunungan dan wisata kuliner.

3.1.3 Visi dan Misi Wisata Halal

Visi

Menjadi kontributor terdepan dalam mewujudkan pariwisata halal di Republik Indonesia

Misi

Mendorong pemerintah untuk berkomitmen baik moril maupun materiil dalam pengembangan pariwisata halal diseluruh Republik Indonesia

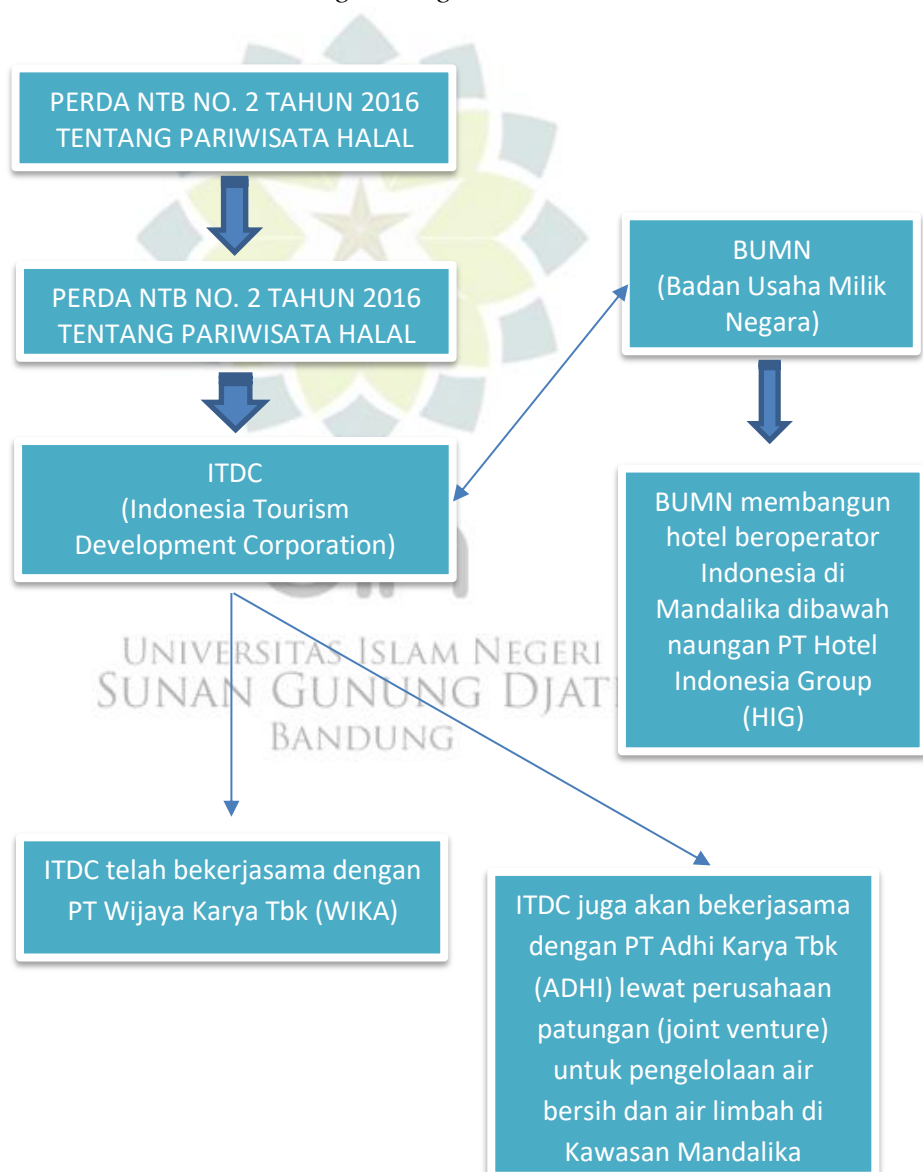
Mendorong pengembangan pariwisata halal sebagai wahana untuk menciptakan kesempatan untuk bekerja dan berinvestasi
Mendampingi setiap daerah maupun objek wisata untuk berkembang menjadi destinasi wisata halal sesuai potensi daerah masing – masing

Memperjuangkan pariwisata halal agar menjadi primadona kepariwisataan nasional

3.1.4 Struktur Pengembangan Wisata Halal Lombok

Bentuk struktur pengembangan wilayah Kawasan Khusus Ekonomi Mandalika, mulai dari terbentuknya peraturan daerah sampai Lembaga yang melaksanakan pembangunan dan pengembangan wilayah Destinasi Wisata Halal.

Tabel 3. 1 Struktur Pengembangan Wisata Halal



3.1.5 Sarana dan Prasarana

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya (Warpani, 2006 dalam Dwiputra, 2013). Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Lebih dari itu selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana yang dimaksud. Menurut Dwiputra (2013) berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Tidak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan.

1. Akomodasi

Daerah tujuan wisata dapat dipandang sebagai titik peralihan kedatangan wisatawan menuju lokasi objek wisata. Dengan kata lain, daerah tujuan wisata dengan akomodasinya adalah simpul penghimpun wisatawan untuk menuju objek dan/atau melanjutkan perjalanan menuju tujuan lain. Beberapa tempat yang berada di daerah tujuan wisata tersebut, sebelum wisatawan melanjutkan perjalanannya menuju objek wisata, diperlukan sarana yang untuk sementara dapat menampung wisatawan berupa hotel atau penginapan (Dwiputra, 2013).

2. Tempat Makan

Hampir seluruh hotel menyediakan satu atau beberapa rumah makan dengan tampilan dan sajian khas, dengan karakter kebangsaan tertentu dan gaya masing-masing, atau sekurangnya kedai kopi tempat makan pagi yang disediakan oleh hotel. Meskipun demikian banyak tamu hotel memilih mencari makanan khas daerah di luar hotel. Selain lebih murah dan menawarkan suasana khas daerah, makan di luar hotel membuka peluang interaksi sosial dengan masyarakat setempat (Dwiputra, 2013).

3. Tempat Belanja

Berbelanja adalah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan pariwisata, bahkan merupakan salah satu jenis pariwisata yang cukup besar artinya bagi suatu daerah tujuan wisata. Belanja tidak semata-mata hanya melayani wisatawan yang sengaja meniatkan diri untuk berbelanja, tetapi juga belanja harus dapat melayani semua wisatawan dan juga masyarakat pada umumnya. Persebaran pusat perbelanjaan, akomodasi, dan jaringan pelayanan angkutan harus menjadi bahan perhitungan dalam menata ruang wilayah sedemikian rupa sehingga wisatawan merasa menjadi bagian dari tujuan, bukan sekedar sebagai pengunjung (Dwiputra, 2013).

Tabel 3. 2 Sarana dan Prasarana Wisata Halal

No.	Uraian	Kondisi
1	Wilayah : Pantai Bukit Rumah adat Gunung Kolam Renang	Pengembangan Masih indah dan asri Tetap terjaga kearifannya Masih indah berkulitas semua
2	Masjid/Musolla	Bagus dan nyaman
3	Hotel/penginapan	Dalam pembangunan
4	<i>Homestay</i>	Baik dan nyaman
5	Infrastruktur	Dalam pembenahan dan pelebaran
6	Transfortasi	Lancar dan sudah berjalan

3.1.6 Letak Giografis dan Wilayah Administratif

Data yang kutip dalam (<https://lomboktengahkab.bps.go.id>) menjelaskan kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu Daerah Tingka II di provinsi Nusa Tenggara Barat dan Ibu kota daerah ini terletak di Praya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.208.39 km² dengan populasi sebanyak 860.209 jiwa. Kabupaten yang memiliki moto Tatas Tuhu Trasna ini terletak pada posisi 82°7'-8°30' Lintang Selatan dan 116°10'- 116°30' Bujur Timur, membujur mulai dari kaki gunung Rinjani

di sebelah Utara hingga ke pesisir pantai Kuta di sebelah Selatan dengan beberapa pulau kecil yang ada di sekitarnya. Batas-batas Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur

Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2016 jumlah penduduk berdasarkan proyeksi di tahun 2015 mencapai 912.879 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 481.054 jiwa perempuan dan 431.825 jiwa laki-laki. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 2,32 persen dengan masing-masing persentase penduduk laki-laki 1,76 persen dan 2,86 persen untuk penduduk perempuan.

Kawasan Pariwisata Mandalika yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan kawasan yang sangat unik dan menarik karena menggabungkan keindahan alam pesisir dengan keunikan budaya masyarakat dan keragaman biodiversitas sumber daya flora dan fauna. Kawasan ini sejak tahun 1987 sudah direncanakan akan dikembangkan sebagai kawasan

pariwisata unggulan di Pulau Lombok. Secara sporadis di beberapa tempat sudah mulai dibangun home stay, penginapan, restoran dan jasa pelayanan wisatawan lainnya.

3.1.6.1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang biasa di singkat KEK Mandalika merupakan proyek yang dibangun oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) yang sebelumnya telah berhasil mengembangkan Nusa Dua Bali. KEK yang terletak di selatan pulau Lombok memiliki luas area sebesar 1.035,67 Ha dan menghadap Samudera Hindia. KEK Mandalika menawarkan pesona pantai dan bawah laut yang menarik. Disini para wisatawan dapat menyaksikan *festival Bau Nyale yang selalu diadakan tiap tahunnya.*

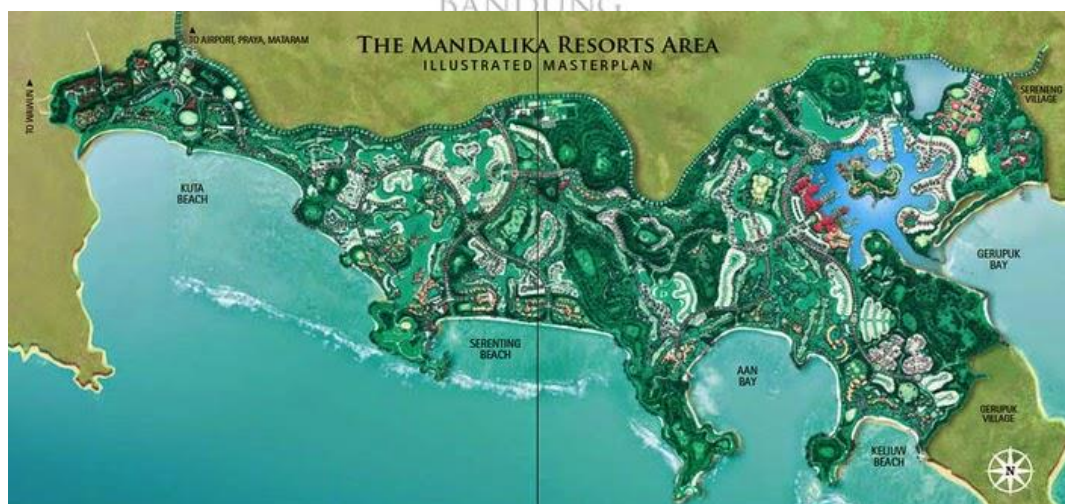


Gambar 3. 1 Pulau Lombok Bagian Selatan

Pada tahun 2019 KEK Mandalika diharapkan dapat menarik 2 juta wisatawan pertahun dengan destinasi wisata bahari dan budaya yang ditawarkan. Proyek ini memiliki konsep mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan pembangunan obyek-obyek wisata daya tarik wisata yang selalu berorientasi kepada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat.

KEK Mandalika adalah KEK yang paling menarik bagi para investor saat ini dan diharapkan menjadi destinasi wisata kelas dunia. Dibangun selama 29 tahun, proyek ini tentunya bukan proyek biasa. Posisi KEK Mandalika juga terbilang sangat strategis di Pulau Lombok. Berjarak kurang lebih 30 menit dari Bandara Internasional Lombok dan terbentang mulai dari pantai Kuta, pantai Seger, hingga Pantai Tanjung Aan. Berikut beberapa obyek wisata yang berada di sekitaran wilayah KEK Mandalika:

Gambar 3. 2 Wilayah Pengembangan KEK The Mandalika



1. Pantai Kuta Mandalika

Pantai Kuta yang dimaksudkan bukan yang berada di Bali, Lombok Tengah juga memiliki obyek wisata yang dinamakan pantai Kuta. Memiliki pasir putih dan tebing yang indah menjadi pesona utama pantai ini. Dapat dikatakan ketika mengunjungi kawasan wisata di KEK kita pasti akan mengunjungi pantai ini, pantai ini merupakan jalur untuk mengunjungi pantai-pantai lainnya. Jadi sayang jika berkunjung ke KEK tidak menyempatkan waktu ke Pantai ini. Ombak yang tidak terlalu besar membuat wisatawan dapat berenang di pinggir pantai.

2. Pantai Batu Payung

Pantai ini terkenal karena ada sebuah karang besar yang mirip dengan payung, makanya pantai ini dinamakan Pantai Batu Payung. Uniknya, berbeda dengan pantai yang memiliki pasir putih pantai ini justru menawarkan sesuatu yang berbeda yaitu hanya terdiri dari batuan dan karang besarnya. Untuk mengunjunginya kita perlu menaiki perahu atau ketika air surut kita dapat berjalan dari Pantai Tanjung Aan ke Pantai Batu Payung.

3. Pantai Seger

Hal yang anda akan lihat pertama kali di pantai ini adalah bukit-bukit yang menjulang tinggi. Pantai ini merupakan tempat pelaksanaan festival tahunan masyarakat setempat yaitu Bau

Nyale. Ratusan warga akan berkumpul di pinggir pantai untuk mengumpulkan cacing laut yang diyakini merupakan jelmaan Putri Mandalika. oleh karena itu, patung Putri Mandalika dibangun di pantai ini.

4. Pantai Gerupuk

Terletak tidak jauh dari pantai Tanjung Aan, pantai ini memiliki ombak yang ganas maka jangan heran kalau banyak wisatawan yang membawa papan selancarnya untuk melawan ombak di Pantai Gerupuk. Selain ombaknya, pantai ini juga merupakan salah satu spot Sunset terbaik di KEK Mandalika.

5. Bukit Merese dan Pantai Tanjung Aan

KEK Mandalika tidak hanya cantik dinikmati pantainya tetapi juga ketinggian bukitnya. Bukit merese merupakan spot yang indah untuk menikmati keindahan alam dari ketinggian. Membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai ke puncak dan kita dapat melihat indahnya surga yang tersembunyi di pulau Lombok ini. Dari puncak kita dapat melihat Pantai Tanjung Aan dan Pantai Batu Payung.

Tidak kalah dengan pantai yang lain, pantai Tanjung Aan menawarkan keindahan pasir-pasir putih dan mericanya untuk dijadikan alas bersantai di pinggir pantai itu menandakan pantai-pantai di Lombok semuanya indah.

6. Desa Adat Sade

Tak lengkap berlibur ke KEK Mandalika kalau tidak singgah di desa adat ini. Desa Ada Sade ini merupakan salah satu obyek wisata budaya yang terkenal dan wajib dikunjungi wisatawan karena posisinya yang merupakan salah satu jalur utama ke pusat KEK. Di sini wisatawan dapat belajar sejarah tentang lombok, kesenian, dan dapat mencari oleh-oleh khas yang merupakan kerajinan langsung masyarakat setempat.

3.2 Hasil Penelitian

3.2.1 Bagaimana upaya Pengembangan Destinasi Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?

3.2.1.1 Upaya pemerintah sebelum adanya wisata halal

Kuta Lombok merupakan salah satu kawasan dari sembilan kawasan pariwisata di Lombok (Perda No. 9 tahun 1989 tentang penetapan 15 kawasan pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat). Kuta Lombok merupakan kawasan pariwisata yang terletak bagian selatan Pulau Lombok yaitu di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, berjarak sekitar 10 km atau perjalanan + 20–30 menit dari Bandara Internasional Lombok (BIL), serta jarak dari Kota Mataram ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu sekitar 50 km.

Pada tahun 2013, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat

nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripparda) yang menetapkan bahwa Kuta Lombok merupakan kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD). Hal ini sejalan dengan peraturan daerah (Perda) pemerintah Kabupaten Lombok Tengah nomor 7 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RT. RW) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2031 yang menyebutkan bahwa Kuta Lombok merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah dengan sektor unggulan pariwisata dan industri.

Meskipun Kuta Lombok potensial untuk dikembangkan, hingga saat ini kepariwisataan di Kuta Lombok masih belum berkembang optimal. Berbeda halnya dengan kawasan wisata Senggigi di Kabupaten Lombok Barat dan Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara. Dua kawasan pariwisata tersebut lebih berkembang daripada Kuta Lombok. Belum berkembangnya kepariwisataan di Kuta Lombok tentu memerlukan upaya yang serius terutama dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya untuk mendorong pengembangan tersebut. Sebab, berkembang atau tidaknya kepariwisataan di Kuta Lombok akan mempengaruhi perkembangan kepariwisataan di Pulau Lombok khususnya dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Oleh sebab itu, perlu adanya langkah-langkah kongkrit dan strategis untuk mengembangkannya dengan tetap pada konsep pengembangan Kuta Lombok sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan.

Bertitik tolak dari permasalahan kesenjangan yang ada, maka dilakukan penelitian untuk dapat merumuskan dan memformulasikan strategi yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan di Kuta Lombok, tepatnya di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah strategi pengembangan Kuta Lombok sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkaji mengenai (1) potensi, (2) kendala, dan (3) merumuskan strategi yang tepat untuk diterapkan dalam pengembangan Kuta Lombok sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta referensi tambahan untuk pengembangan suatu daerah, wilayah ataupun kawasan menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan.

3.2.1.2 Usaha menjadi wisata halal yang lebih baik

1. Pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah sedang mengembangkan berbagai inovasi untuk menarik para wisatawan mancanegara maupun domestik.
2. Pemerintah Provinsi NTB mendorong wisata halal di daerah tersebut dengan mengembangkan wisata Ramadhan.
3. Wisata diwujudkan dalam Program bernama Pesona Khazanah Ramadhan di Bumi Seribu Masjid.
4. NTB ingin menciptakan inovasi dan kreativitas agar semakin mengukuhkan diri sebagai destinasi wisata halal.

3.2.2 Apa saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengembangan Destinasi Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?

3.2.2.1 Faktor Pendukung

3.2.2.1.1 Visi dan misi Pemerintah Daerah yang sejalan dengan pengembangan pariwisata halal.

Mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera, menjadi arah Pemerintah Daerah dalam menetapkan langkah pembangunan daerahnya. Pemerintah Daerah membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana. Setiap wisatawan muslim yang datang ke Lombok, tidak akan kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Seperti sarana mushola atau masjid yang harus ada di setiap tempat wisata. Termasuk ketersediaan makanan halal di cafe atau restoran.

3.2.2.1.2 Jati diri masyarakat Lombok yang kental dengan penerapan nilai-nilai agama Islam

Kultur masyarakat seperti ini sebagai pendukung kuat dalam pengembangan pariwisata halal. Tingginya semangat beragama masyarakat Lombok mendorong implementasi program-program yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat Lombok yang dari awalnya

telah terbiasa dengan penerapan syariat Islam, menjadi tidak sulit lagi ketika aturan pariwisata Syariah ditetapkan. Peran masyarakat menjadi kunci dalam program pariwisata yang ditetapkan pemerintah. Kontrol dan dukungan masyarakat menjadi faktor kesuksesannya dan menjadi sebuah unsur utama yang menjadi pendukung untuk pengembangan kepariwisataan.

3.2.2.1.3 Produk kepala daerah yang sejalan dengan pengembangan pariwisata halal

Termasuk upaya **kepada** daerah dalam mendorong terbitnya peraturan mengenai destinasi pariwisata halal di provinsi NTB. Hal ini ternyata signifikan dengan peningkatan jumlah produk yang bersertifikat halal di Lombok.

Peluang *Halal Tourism* di Lombok

1. Daya tarik pariwisata yang beragam dan sudah berkembang.
2. Memperkenalkan kekayaan dan keindahan alam kepada turis.
3. Memberikan kenyamanan bagi turis khususnya kaum muslim
4. Memperkenalkan kerajinan khas Lombok
5. Meningkatkan industri pariwisata Indonesia hingga mancanegara
6. memperkenalkan kuliner berlabel halal khas Lombok

7. Bisa di gunakan sebagai tempat Honeymoon
8. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas untuk turis
9. Meningkatkan tenaga kerja yang berprofesional dan mengurangi pengangguran.
10. Meningkatkan pendapatan ekonomi Indonesia.
11. Mampu menjaga kebudayaan masyarakat Lombok.
12. Membentuk karakter yang mengikuti perkembangan zaman.
13. Usaha yang tepat

3.2.2.2 Faktor penghambat

Tantangan *Halal Tourism* di Lombok

1. Kondisi kesejahteraan masyarakat sekitar the Mandalika masih belum Nampak
2. Masih ada wisatawan yang belum memahami makna *Halal Tourism* (masih ada wisatawan yang berpakaian terbuka)
3. Di Lombok saat ini hanya memiliki 15 guide yang bisa berbahasa Arab
4. Masih lemahnya branding dan promosi sebagai muslim-friendly destination
5. Masih kurangnya sertifikasi untuk muslim-friendly amenities
6. Aksesibilitas dari dan kota-kota besar mancanegara yang harus ditingkatkan

Masyarakat masih banyak kontra terhadap wisata Syariah termasuk bupati Lombok Timur Ali Bin Dahlan yang menjabat saat ini. “Tidak ada wisata Syariah di duniapun tidak ada, jangan menggunakan wisata Syariah, kalau menurut Islam wisata itu haram, karena ada yang mubazir membuang-buang uang dilarang itu oleh agama, jadi tidak ada Syariah dalam wisata” (dilansir dari TV9 Mataram).

Menurut hasil wawancara staf Dinas Pariwisata NTB ada berbagai faktor penghambat yang masih dalam proses pelaksanaan dan pembenahan. “Tentunya kita banyak mengadopsi atau banyak membutuhkan penyesuaian-penyesuaian, melakukan himbauan-himbauan kepada perilaku pariwisata di tempat-tempat keramaian umum atau destinasi wisata. Jadi kalau misalnya ada wisatawan datang ke situ ini pungsinya juga dari para pramu wisata (*guide*) bisa menyampaikan supaya kita harus berpakaian yang tertutup, itu sosialisasi-sosialisasi kemudian permakluman yang di berikan kepada wisatawan-wisatawan asing yang datang supaya oh kita berada di daerah ini harus berpakaian tertutup”(Lalu Kusuma Wijaya 15-01-2019 jam 09:30).

3.2.3 Bagaimana Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Setelah Adanya Program Pengembangan Destinasi Wisata Halal?

3.2.3.1 Aspek pengembangan wisata halal

3.2.3.1.1 Aspek Kebudayaan

Kalau kita lihat masyarakat kita dan juga wisatawan yang hadir dengan berpakaian yang terbuka itu masih jadi omongan, apa lagi sampai masuk-masuk kampung yang memang di dalam kampung tersebut masih erat kebudayaannya sehingga itu harus di jaga agar mampu mempertahankan kebudayaan tersebut.

Sisi yang lainnya adalah ntb ini harus mempunyai parian dan mempunyai keunggulan karena kita disini seperti tetangga sebelah kita Bali yang memang sudah sangat pesat dengan konsep wisatanya. Karena kita tau bagaimana model pariwisata yang dikembangkan sebelumnya itu memberikan kesan dampak-dampak yang banyak orang yang menganggap itu tidak relevan dengan bagaimana adat istiadat, bagaimana juga keseharian dan juga mungkin religinya masyarakat ntb, jadi itu tujuan-tujuan pokok, tujuan-tujuan besarnya bagaimana dan kenapa ntb ini mengembangkan model parian baru dari pariwisata itu adalah halal tourism. Kenapa kita juga mengambil itu, karena pariwisata itu adalah sesuatu yang bukan dibuat-buat, kita hanya tinggal mengemas dari apa yang menjadi kekayaan alam kita kekayaan budayaa budaya kita kekayaan keramahan masyarakat kita, dan juga adat istiadat kita (Lalu Kusuma Wijaya 15-01-2019 jam 09:30).

3.2.3.1.2 Aspek Kesejahteraan

Pemberdayaan masyarakat sekitar adalah prioritas utama, karena itu ITDC sangat sadar bahwa pengembangan harus memiliki keseimbangan sosial, tujuan kita adalah untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga sampai saat ini pembangunan terus di kebut agar harapan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

3.2.3.2 Hasil peningkatan pemberdayaan

Didalam kosep pengembangan pemberdayaan itu ada pembagian zona-zona, ada di luar itu namanya kawasan penyangga Kawasan-kawasan tersebut menjadi loaksi pilihan untuk berlibur kalau sudah berkeliling di daerah Mandalika, yang menjadi Kawasan penyangga itu addalah seluruh wilayah Lombok Tengah, tentu ada yang paling dekat. Karena pengembangannya berbentuk

wilayah 1 wilayah 2 wilayah 3 dan seterusnya. Sampai ke Rinjadi adalah penyangga KEK Mandalika ini.

Apa yang menjadi daya tarik di KEK ini ikut juga disangga oleh di luar Mandalika, yang terdekat di Lombok Timur ada pantai pink, ada desa-desa budaya di luar Kek, ada desa-desa pusat kerajinan rotan seperti yang ada di Lombok Barat di Lombok Tengah itu dipersiapkan sebagai penyanggah, karena apa jarak dari sini ke sana itu cukup dekat dan menjadi pilihan bagi wisatawan.

Lantas kembali kepada pertanyaan tadi pengembangan Wisata Halal ini ada peningkatan, yang paling nyata dengan adanya Lombok terkenal sebagai Halal Tourisem, itu ada peningkatan wisatawan untuk membelanjakan uangnya di Lombok bagi masyarakat.

3.2.3.2.1 Sumber daya Ekonomi

1. Penerimaan investasi pembangunan hotel

Akomodasi atau Hotel itu bisa menyediakan kamar-kamar yang ramah dengan muslim berkelas dunia, para pelancong muslim, supaya mereka bisa merasakan kenyamanan fasilitas hotel sesuai dengan aturan yang ada dengan cara bertahap.

Jadi dari semua sisi kita coba menghimbau, mengajak, mendorong usaha di sektor pariwisata untuk bisa bersama-sama mensupport apa yang menjadi upaya kita untuk menjalankan halal tourisem di NTB ini.

2. Sirkuit Moto GP

Pembangunan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika, sirkuit ini dibuat terbuka sehingga nantinya bisa di gunakan sehari-hari oleh

masyarakat maupun wisatawan yang datang berwisata di KEK The Mandalika dan melihat keindahan pantai-pantai di sekitar pengembangan Wisata Halal, pemerintah provinsi NTB menyatakan siap mendukung pembangunan sikuit dan berharap ada banyak dampak positif dari pembangunan Ekonomi Khusus Mandalika.

Lalu M. Fauzan Kepala Dinas Pariwisata NTB berpendapat bahwa “dari sisi pemerintah daerah terus mensupport, karena Kawasan ini adalah pengelolaan di bawah BUMN maka pemerintah daerah fungsinya adalah mempercepat semua proses regulasi dan kesiapan-kesiapan yang lain terutama ketika melakukan promosi dan meyakinkan masyarakat bahwa siap menjadi tuan rumah yang baik dari pelaksanaan iven MotoGP.

3. Travel

Melihat kemajuan kepariwisataan yang ada di pulau Lombok yang memiliki daya tarik bagi para wisatawan sehingga setiap tahunnya pengunjung berliburan ke Lombok semakin meningkat, pihak penyedia (travel) paket Wisata Halal pun semakin di cari-cari oleh para wisatawan. Sehingga kemasukan travel semakin tinggi, travel yang di sediakan oleh pemerintah maupun swasta menjadi pilihan utama wisatawan sebagai *guide tour* mengelilingi Pulau Lombok.

Bukan hanya itu banyak dari wisatawan yang datang bersama teman-temannya yang dari Lombok untuk melancong bersama karena ia percaya bahwa Lombok itu indah.

4. Pelatihan Dasar Dewirausahaan UMKM Mitra Bazaar The Mandalika.

1. Memberikan manfaat
2. Motifasi untuk selalu optimis dan bersemangat
3. Perlu belajar untuk melihat dalam berbisnis
4. Menambah keilmuan kehidupan ke depan yang lebih baik melalui mitra kebutuhan dan kesehari-harian
5. Perlu menjaga kebersihan dalam lingkungan Bazaar Mandalika.

3.2.3.2.2 Sumber daya Manusia (Pendidikan)

Pelatihan dan pengembangan berbahasa inggris yang telah di lakuka di Desa Sasak Ende dan Sade Manfaat yang di dapatkan:

1. Lebih mahir dalam berkomunikasi Bahasa inggris
2. Mengurangi rasa malu menyambut wisatawan asing menggunakan Bahasa ingris
3. Wawasan yang mendalam tentang layanan *hospitality* (keramahan).

Pelatihan Pertanian di Kawasan The Mandalika

1. Lebih memahami bagaimana cara mengelola atau memanfaatkan dan di jadikan bahan kompos.

2. Lebih mengerti bagaimana cara merawat tanaman, cara mengelola tara ruang agar hasil yang diharapkan sesuai dengan harapan.

3.2.3.2.3 Sumber daya Alam (penghijauan wilayah pantai)

Pembangunan Kawasan publik (*public area*)

1. Pembangunan Masjid Nurul Bilad berkapasitas 4000 jamaah yang telah di resmikan pada tahun 2017

Telah menyelesaikan dan terus di benahi area pantai kute (*area beach park*).

1. Jalan raya sepanjang pinggiran pantai
2. Beach fasiliti (toilet, loker, mussolla).
3. Tempat berseluncur
4. Trotoar di seluruh tepi pantai
5. Fasilitas tempat duduk-duduk santai

3.3 Pembahasan

3.3.1 Aspek Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat berupa:

1. Mendorong penggunaan metode induktif campuran (GT dan *Case Study*) dalam menyelesaikan persoalan Pengembangan Destinasi Wisata Halal. Persoalan Wisata Halal yang kompleks dan dinamis memerlukan pendekatan yang konsisten untuk mengurai dan

mengkategorikan persoalan menjadi konsep dan teori yang berlaku umum.

2. Mendorong stakeholder sektor Wisata Halal untuk mengatur penyelenggaraan Pengembangan Destinasi Wisata Halal sebagai sebuah “sistem yang dikelola” (*managed system*) artinya industry Wisata Halal dikelola secara kolektif dan simultan oleh seluruh pelaku. Sehingga efisiensi dan efektif manajemen Wisata Halal pada level proyek atau perusahaan harus diikuti efisiensi dan efektif manajemen Wisata Halal pada level industri.
3. Mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam pelaksanaan dan pengembangan Wisata Halal supaya dalam pemasarannya sampai mancanegara.
4. Formulasi kebijakan ITDC yang efisien dan efektif dapat dicapai melalui kematangan pembangunan dan pengembangan pada saat yang sama harus dibarengi dengan struktur pasar yang sehat dan kapasitas industri yang semakin besar.
5. Hubungan keterkaitan antara Pemerintah dan pelaksana pengembangan (ITDC), kapasitas industri dan struktur pemasaran sebagai hipotesis awal untuk di uji pada kajian yang lebih besar dan lanjutan. Dalil ini dibangun dari konseptualisasi dalam pengembangan Destinasi Wisata Halal melalui Pemerintah Daerah agar menemukan kesejahteraan dan menjadi fondasi bagi kajian yang lebih besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji lebih detail peran mekanisme pemasaran Wisata Halal, karena pada kajian ini masih membutuhkan kepastian hukum yang belum di bentuk secara sah.

3.3.2 Analisis Penelitian

Pulau Lombok merupakan pulau kecil yang terletak di antara pulau Bali dan Sumbawa, Lombok terkenal dengan pulau seribu masjid selain itu mendunia karena keindahan alamnya yang memanjakan mata wisatawan. Dari dulu hingga sekarang alamnya dikelola menjadi sebuah destinasi wisata yang ramah lingkungan. Dengan alamnya yang masih indah dan pihak pemerintah mengambil alih untuk mengembangkan wisata baru yaitu Wisata Halal.



Gambar 3. 3 Pusat Pantai The Mandalika

NTB mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal dengan salah satu tujuannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata di NTB. Serta melakukan kerja sama dengan aparat terkait seperti Polisi, TNI, komunitas sadar wisata, serta masyarakat untuk memberikan keamanan bagi wisatawan.



Gambar 3. 4 Gunung Rinjani

Tujuan Wisata ramah keluarga ini merupakan untuk mengakomodasi wisatawan Muslim yang berwisata karena memiliki karakter dalam berwisata sering berwisata bersama keluarga. Jadi, dengan seperti itu wisatawan Muslim dapat melakukan kegiatan wisata dengan nyaman dan aman bersama keluarganya. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Asosiasi Travel Agent Indonesia

Provinsi NTB dengan tujuan wisata mulai dari Desa Sade, Islamic Center NTB, Masjid Kuno Karang Bayan, Sesaot, Air Terjun Benang Kelambu, Gili Nanggu, Gili Kedis Gili Sudak. Serta beberapa kawasan strategis lainnya.

Segala bentuk tempat wisata terus di kelola dan dikembangkan dengan baik agar keindahan alamnya tetap terjaga, pihak pemerintahpun terus turun tangan bersama masyarakat yang telah mengelola tempat-tempat wisata yang ada di pulau Lombok dan di jadikan salah satu pusat penghasilan masyarakat sekitar, dengan demikian wisata yang ada di NTB merupakan wisata diperuntukkan bagi masyarakat agar menjadi masyarakat yang lebih konsisten dalam menjaga keindahan lingkungan.

Lombok memiliki Kawasan wisata yang dapat dikelola dan di kembangkan menjadi Wisata Halal sebagai wisata parian baru agar wisatawan dapat memilih sesuai dengan keinginan bersama keluarga. Kawasan Ekonomi Khusus yang ada di The Mandalika merupakan wilayah pantai selatan yang dulunya kurang dikelola oleh pemerintah dan pada tahun 2016 pemerintah menjadikan KEK sebagai pusat pengembangan Wisata Halal. Pulau Lombok juga terkenal dengan seribu masjidnya ini menjadi daya tarik wisatawan untuk berlibur menghabiskan uang sebanyak-banyaknya bersama keluarga. Sumber daya lingkungan yang masih asri dapat membuat mata para pelancong luar negri betah di Lombok. Keramahan masyarakat Lombok menerima wisatawan terbukti

dari sedikit banyaknya masyarakat Lombok yang menikahi para turis-turis mancanegara.

Program Wisata Halal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan disetujui oleh presiden RI ini merupakan peluang besar bagi Pengembangan Wisata Halal di KEK The Mandalika sehingga BUMN kerja sama dengan ITDC sebagai pelaku dalam pembangunan dan pengembangan Wisata Halal. Mayoritas dukungan dari masyarakat yang begitu antusias melihat kemajuan pariwisata di NTB yang menjadi bagian dari sebuah peluang besar dalam menjalankan pembangunan kepariwisataan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

1. Langkah pemerintah untuk memajukan provinsi NTB yang dilakukan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan melalui program-program yang menguntungkan bagi masyarakat Lombok, pengembangan Destinasi Wisata Halal menjadi program utama yang disebut pembangunannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam keputusan pembangunan tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah mulai dari tahun 2013 untuk membentuk Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) yang diputuskan bahwa patai Kuta adalah kawasan paling strategis untuk pengembangan kepariwisataan daerah. Tahun 2016 pemerintah mengeluarkan UU untuk memutuskan pembangunan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terletak di Kuta The Mandalika. Semua usaha dan upaya pemerintah untuk terus mempertahankan pembangunan Wisata Halal pastinya penuh dengan tantangan karena sebagian dari masyarakat masih ada yang menentang mengenai pengembangan Wisata Halal ini yang kemudian menjadi kajian utama dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan baru untuk membuat para wisatawan memiliki pilihan baru untuk berliburan.
2. Segala bentuk usaha yang kita lakukan pasti ada sebuah faktor pendukung dan penghambat yang ada, Wisata Halal merupakan sebuah program yang memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat. Dalam

menjalankan pembangunan pemerintah menemukan berbagai bentuk hambatan-hambatan yang masih membutuhkan perhatian yang lebih dari pihak penyelenggara pengembang Wisata Halal, hambatan yang bersifat jangka pendek maupun jangka Panjang, dan ini harus menjadi prospek ke depan agar mampu memecahkan segala persoalan yang ada, karena melihat pendukung untuk menjalankan pembangunan tersebut lebih banyak ketimbang faktor penghambatnya.

3. Setelah menjalankan sebuah upaya untuk pengembangan Wisata Halal kemudian memecahkan beberapa faktor penghambat yang ditemukan begitu banyak di lapangan namun semua itu pihak pemerintah terus mencari solusi agar mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dari program Wisata Halal tersebut. Kemudian dari beberapa langkah, upaya, usaha agar menjadi daerah yang lebih baik sampai saat ini Wisata Halal sudah mampu memberikan perubahan bagi masyarakat sekitar, memberikan dampak yang begitu besar bagi pengembangan keekonomi masyarakat NTB khususnya Lombok. Ada tiga aspek yang telah berhasil dikembangkan oleh pemerintah melalui program Wisata Halal sebagai berikut; aspek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), aspek Pengembangan Sumber Daya Ekonomi (SDE), aspek Pengembangan Lingkungan (SDA). Pengembangan-pengembangan tiga aspek tersebut masih membutuhkan perhatian agar kehidupan masyarakat sekitar mampu berjalan sesuai dengan perkembangan Wisata Halal di KEK The Mandalika.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti maka saran yang di rekomendasikan kepada pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Banyak hal yang belum diteliti oleh penulis diharapkan kepada peneliti selanjutnya bisa melengkapi hasil peneltian ini agar menjadi karia ilmiah yang semakin sempurna.

2. Bagi wasita halal

Wisata Halal masih dalam pembangunan besar-besaran dan berjalan sesuai harapan pihak pemerintahan maupun masyarakat, karena itu secara tidak langsung terlihatnya keantusiasan serta dukungan dari masyarakat dalam melihat pembangunan KEK Mandalaka, apa yang diharapkan masyarakat harus bisa diperjuangkan oleh pemerintah maupun pihak ITDC sebagai pelaksana pembangunan KEK. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama pendukung pengembangan Wisata Halal yang harus dipertahankan kepercayaannya atas pembangunan KEK tersebut. Dari semua fakor-fakor pendukung tersebut agar mampu memecahkan persoalan-persoalan maupun hambatan dalam pengembangan Wiasata Halal.

Wisata Halal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ITDC diberikan kepercayaan agar bisa melakukan pengembangan bagi masyarakat sekitar KEK, dalam hal ini jangan sampai pembangunan hanya menguntungkan bagi para penguasa Negara maupun Daerah

tetapi harus bisa menguntungkan bagi seluruh rakyat Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok dan supaya lebih memberikan perhatian kepada masyarakat-masyarakat yang masih membutuhkan bantuan-bantuan materil mapapun non-materil yang memang kebetulan tinggal di daerah KEK.

3. Bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat sekitar bisa berpartisipasi terhadap kemajuan wisata halal dan menjadikan ladang pengahsilan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Bagi pemerintah

Pemerintah dalam pembangunan program yang begitu besar dan mengakibatkan berubahnya tatanan sosial masyarakat oleh karena itu dalam pembangunan tersebut penulis berharap pihak pemerintah harus mampu mempertahankan kehidupan, kebiasaan, adat istiadat, maupun budaya masyarakat Sasak agar tidak tergerus oleh para kebiasaan wisatawan yang datang dari seluruh penjuru Dunia yang mempuyai berbagai macam kebudayaan. Diharapkan Wisata Halal dapat dikemas melalui kebudayaan masyarakat Sasak Lombok.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG